

.....  
**STRATEGI INTEGRASI KOMANDO GABUNGAN WILAYAH PERTAHANAN I DAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA OPERASI MILITER  
DALAM MENDUKUNG KAMPANYE MILITER**

Oleh

Adam Mardamsyah<sup>1)</sup>, Surya Wiranto<sup>2)</sup>, Harangan Sitorus<sup>3)</sup>,  
Hipdizah<sup>4)</sup>, Dwi Saptono<sup>5)</sup>, Haposan Simatupang<sup>6)</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Prodi Strategi dan Kampanye Militer, Fakultas Manajemen Pertahanan, Unhan RI  
Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

Email: [1kamalekumdeplek@gmail.com](mailto:kamalekumdeplek@gmail.com)

**Abstrak**

Kampanye Militer merupakan serangkaian dari beberapa Operasi gabungan yang dilaksanakan secara berurutan, untuk mencapai sasaran strategis dan operasional pada suatu ruang dan waktu (TNI 2019). Penelitian ini bertujuan a). Untuk menganalisis pelaksanaan operasi militer Kogabwilhan I dalam mendukung Kampanye militer di wilayah Natuna. b) Untuk menganalisis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung Kampanye militer. c) Untuk menganalisis Strategi integrasi Kogabwilhan I dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Kampanye militer. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian 1) Kogabwilhan I bertugas sebagai penindak awal, pemulih, penangkal sesuai kebijakan Panglima. 2) fungsi Pemerintah Kepri meliputi Keamanan, pembangunan ekonomi dan Infrastruktur. 3). Terselenggaranya kegiatan pembinaan teritorial melalui metode Komsos dengan komponen masyarakat. Pembahasan konsep Kampanye militer Kogabwilhan I dalam pelaksanaan kerangka Strategis negara menentukan tujuan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan mengembangkan sumber daya nasional termasuk militer, namun untuk mencapainya konteksnya juga ditentukan oleh hubungan masyarakat yang menopang dan terjalin aktivitas antara sipil dan militer sehingga prajurit dapat mencintai dan dicintai rakyat serta terbangun kesadaran bela negara. Kerjasama dimaknai sebagai bentuk proses sosial untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Maka terselenggaranya kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dengan dukungan masyarakat Kepri terbangun hubungan emosional yang erat dan positif antara prajurit dengan masyarakat.

**Kata Kunci: Strategi, Integrasi, Kogabwilhan I, Pemprov Kepri, Operasi Militer, Kampanye Militer**

**PENDAHULUAN**

Klaim sepihak kedaulatan China atas laut yang diperkirakan memiliki sumber daya alam yang sangat kaya itu telah menjadikan musuh bagi penggugat yang bersaing, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam (Blackwill, Jerome and Elizabeth 2021). Pada awal tahun 1970-an, negara-negara mulai mengklaim pulau-pulau dan berbagai zona di Laut Cina Selatan. [Cina mempertahankan pendapat](#) bahwa, menurut

hukum internasional, militer asing tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan intelijen, seperti penerbangan pengintaian di zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Kawasan Asia Tenggara akan menjadi tempat perlintasan kekuatan militer negara yang berkonflik, Kemungkinan terjadinya perang dengan penggunaan senjata tetap ada, dapat terjadi kapan saja hanya membutuhkan pemicu yang tepat, namun prediksi perang akan berlangsung singkat, terlokalisir di area yang

terbatas, pihak-pihak yang terlibat akan berusaha sedapat mungkin penggunaan senjata nuklir (Kasih, et al, 2019). Indonesia telah mempertahankan posisi netral dalam sengketa, tapi ini bisa berubah jika Beijing terus melanggar hak - hak di Laut Natuna Utara. China dapat melihat aksi militer sebagai satu-satunya jalan jika kehilangan opsi diplomatik untuk menegaskan klaim kedaulatannya ( Council on Foreign Relations 2020).

Guna memitigasi dan meminimalisasi timbulnya ancaman dan gangguan di Kepulauan Riau, maka seyogyanya satuan-satuan TNI setempat seperti Komando Resor Militer (Korem) 033/Wira Pratama, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) Tanjung Pinang dan Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara (Lanud) Haji Fisabilillah dengan melibatkan Pemda Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung kampanye militer. Pengembangan Integrasi guna memiliki arti penting dalam pembangunan nasional, sehingga dapat dijadikan potensi dalam mendukung Kampanye militer sekaligus dalam rangka pertahanan negara. Upaya pengembangan Integrasi tersebut dapat diintegrasikan dalam program pembinaan teritorial yang diselenggarakan Kogabwilhan I (Suhirwan, et al, 2020).

Wilayah darat, laut, dan udara, dimana Komandan Satuan Tugas Gabungan (Kogabwilhan I) beserta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diintegrasikan untuk merencanakan dan melakukan operasi militer untuk menyelesaikan misi tertentu. Daerah operasi gabungan termasuk parameter penentunya, seperti waktu, ruang lingkup, dan daerah geografis, bersifat kontingensi/Krisis. Sampai saat ini beberapa sumber daya nasional belum mampu dikembangkan dengan maksimal oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pramono et al, 2021). Dihadapkan dengan Kogabwilhan I mengalami berbagai kendala dan permasalahan salah satu yang dihadapi penyiapan logistik/bekal ulang dan sarana prasarana dalam Kampanye militer serta

banyak pulau-pulau yang masih belum terisi dan didiami (berpenghuni) oleh penduduk maka diperlukan upaya pengembangan strategi integrasi oleh Kogabwilhan I dan Pemda Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung Kampanye militer (Dipua et al, 2021). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas topik mengenai bagaimana strategi mengintegrasikan Kogabwilhan I Dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pada Operasi militer Dalam Mendukung Kampanye militer”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka disusun rumusan masalah penelitian yang diuraikan kedalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan operasi militer Kogabwilhan I dalam mendukung Kampanye militer di wilayah Natuna?, Bagaimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung Kampanye militer?, Bagaimana Strategi integrasi Kogabwilhan I dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Kampanye militer?

## METODE PENELITIAN

Dalam tataran Negara, strategi merupakan cara untuk mengembangkan dan menggunakan sumber daya nasional sesuai dengan pedoman kebijakan untuk menciptakan, memajukan, dan melindungi kepentingan nasional (Indah Novita Sari 2015).

Berdasarkan teori model Lykke, strategi merupakan keterkaitan antara tiga unsur elemen, yakni *Ends* (sasaran atau tujuan yang ingin dicapai), *Means* (sarana atau sumber daya yang dimiliki untuk mengejar tujuan dan sasaran), dan *Ways* (cara atau metode untuk mencapai tujuan dengan mengorganisasi dan menggunakan sumber daya) ( Jeffrey W. Meiser 2016).

Metode Penilitan yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan

secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2020). Data-data di lapangan dipertemukan dengan para akademisi, praktisi dan birokrasi. Berangkat dari persoalan melihat peranan aspek Integrasi. Selanjutnya ini bertujuan untuk membuat strategi pertahanan dan mengidentifikasi implementasi strateginya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu instansi dengan menggunakan sarana prasarana, dengan target dan prioritas serta untuk tujuan bersama yang lebih besar (Karl w Deutsch 1966).

Berdasarkan Undang-undang no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 1 ayat 2 sistim pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sebagaimana Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan “melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) butir b angka 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengamanatkan bahwa memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan dilakukan melalui program territorial aspek Darat, aspek Laut, dan aspek Udara melalui pembinaan ketahanan wilayah dengan metode Komunikasi sosial secara struktural dilaksanakan oleh seluruh satuan. Namun secara fungsional lebih dominan dilakukan oleh satuan kewilayahan, sedangkan satuan lain melaksanakannya secara terbatas. Dalam konteks komunikasi sosial

guna meningkatkan kesadaran bela negara, kegiatan formal komando kewilayahan dilakukan berdasarkan program kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mabesad, Dephan maupun instansi pemerintah lainnya (Hartono,et al, 202). Komunikasi sosial digunakan untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas, peran, fungsi, visi dan misi serta kebijakan pimpinan TNI AD secara terarah, terencana dan berlanjut (Lebo et al, 2021).

Komunikasi sosial tersebut dilaksanakan kepada seluruh komponen masyarakat, aparat pemerintah, Keluarga Besar TNI untuk membangun suatu kondisi juang yang dinamis dan tangguh. Pelaksanaan komunikasi sosial yang diselenggarakan oleh jajaran Kodam telah diatur di dalam program dan anggaran TNI AD khususnya dalam bidang teritorial. Program Kodam tersebut dijabarkan lagi kepada satuan yang ada dibawahnya melalui direktif pembinaan dan penyelenggaraan komunikasi sosial (La Ode, et al, 2021). Pokok-pokok penyelenggaraan komunikasi sosial yang dilaksanakan Kodam diantaranya agar prajurit lebih memahami dan memiliki kemampuan komunikasi sosial sehingga dapat berkomunikasi, berinteraksi dan beradaptasi dengan komponen bangsa lainnya, guna menjalin hubungan yang harmonis dengan harapan mampu menggugah, mendorong dan membangkitkan serta mengajak seluruh komponen bangsa ikut berpartisipasi untuk kepentingan pertahanan negara (Harris et al, 2021).

Sasaran kedalam. Terlaksananya pemeliharaan kemampuan komunikasi sosial bagi jajaran prajurit. Terlaksananya peningkatan kemampuan komunikasi sosial bagi jajaran prajurit dan Sasaran keluar Terselenggaranya kegiatan Komsos dengan Aparat pemerintah agar terbangun pemahaman yang positif tentang Binter di kodam dan terjalin kerjasama yang erat dalam pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan aspek Darat, aspek Laut dan aspek Udara (Hastym et al,

2021). Terselenggaranya kegiatan Komsos dengan komponen masyarakat agar terbangun hubungan emosional yang erat dan positif antara prajurit dengan masyarakat, sehingga prajurit dapat mencintai dan dicintai rakyat serta terbangun kesadaran bela negara dalam masyarakat guna meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat (Bambang Suranto 2009).

Awal terjadinya keadaan perang tergantung dari arah kebijakan serta keputusan politik dan terdapat deklarasi perang dari presiden (Hendra et al, 2019). Pada fase tersebut presiden melakukan kesiapsiagaan langsung dari berbagai aspek meliputi sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana/prasana nasional untuk menghadapi perang. Kesiapsiagaan langsung tersebut baiknya dapat dilakukan sebelum deklarasi perang disesuaikan dengan situasi politik negara dalam rangka *dettrent effect* sebagai daya tangkal serangan musuh. Panglima TNI mengerahkan kekuatan TNI secara total didukung dengan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara dan memerintahkan Kotamops TNI untuk memberlakukan RO keadaan perang menjadi PO untuk totalitas menghadapi perang konvensional terhadap musuh dengan strategi yang bersifat defensif aktif dan menggunakan pola pertahanan berlapis. Tindakan yang dilakukan dengan menghancurkan musuh di pangkalannya, dalam perjalanan dan setelah masuk ke wilayah NKRI melalui wilayah Natuna. Apabila musuh berhasil merebut dan menguasai wilayah yang menjadi pintu masuk melalui wilayah Natuna yang merupakan wilayah NKRI maka dilaksanakan perang berlarut dengan taktik gerilya. Keadaan situasi tidak menuntut membutuhkan penggunaan kekuatan Operasi Militer Perang dengan penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Selain operasi tersebut dilakukan dengan kementerian/ lembaga terkait lainnya (Hermawan et al, 2021).

Salah satu Wilayah Pertahanan Kogabwilhan I dan bagian dari daerah kepulauan Riau yang terindikasi masuk di tiga kategori perkembangan lingkungan strategis secara bersamaan yaitu perkembangan global, regional, dan nasional dalam perkembangan lingkungan strategis adalah Wilayah Natuna (Junaidi et al, 2021).

TNI terintegrasi dengan mitra antar instansi dan lembaga dalam berbagai operasi militer. Kerja sama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting untuk memajukan, mempertahankan kepentingan nasional guna memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan melalui kekuatan militer. Satuan-satuan militer mempertahankan keunggulan dan terus meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi ancaman. Kondisi keamanan negara menuntut TNI untuk mahir dalam berbagai operasi militer, efektifitas penyelenggaraan operasi militer /OMP, berdasarkan kondisi geografis, yuridis, sosiologis, dan historis.

Pelaksanaan adalah penerapan rencana operasi dengan mengerahkan kekuatan untuk menyelesaikan misi dan penyesuaian berdasarkan perubahan situasi (Headquarters Department of the Army 2012). Dalam pelaksanaannya seluruh unsur terkait memfokuskan upaya untuk menjabarkan keputusan menjadi tindakan. Mengarahkan tindakan untuk menerapkan kekuatan pada titik dan waktu yang menentukan. Yang melekat dalam Pelaksanaan adalah memutuskan apakah akan melaksanakan tindakan yang direncanakan (Tahapan) atau untuk mengubah rencana berdasarkan peluang atau ancaman yang tidak terduga. Selama pelaksanaan, situasinya dapat berubah dengan cepat. Operasi yang dibayangkan dalam rencana mungkin tidak memiliki kemiripan dengan peristiwa aktual dalam pelaksanaannya. Unsur pelaksana membutuhkan garis lintang maksimum untuk memanfaatkan situasi dan memenuhi maksud yang lebih tinggi saat perintah asli tidak lagi berlaku. Pelaksanaan yang efektif

membutuhkan pemimpin yang terlatih dalam pengambilan keputusan independen, agresivitas, dan pengambilan risiko dalam lingkungan Operasi.

Inisiatif sangat mendasar bagi kesuksesan dalam operasi apapun, namun itu saja tidak cukup, jika tidak diikuti oleh tindakan cepat dan tanpa henti, akan menyebabkan kesempatan menguntungkan akan berkurang dan menghilang. Operasi yang berhasil adalah memelihara momentum yang dihasilkan oleh inisiatif dan meraih keberhasilan.

Secara operasional, inisiatif menetapkan atau mendikte ketentuan tindakan selama operasi. Dengan menghadirkan tekanan terhadap ancaman, unsur-unsur terkait operasi memaksa ancaman untuk bereaksi terus menerus sampai akhirnya didorong ke posisi yang tidak dapat dipertahankan. Memanfaatkan kesalahan ancaman, sambil terus menerapkan tekanan berkelanjutan untuk mencegah ancaman pulih. Tindakan-tindakan ini memungkinkan untuk memanfaatkan peluang dan menciptakan jalan baru untuk keberhasilan.

Pangkogasgab mengidentifikasi waktu dan tempat sehingga dapat menyusun efek kekuatan menjadi kondisi menguntungkan. Untuk memaksa suatu reaksi, dengan mengancam pusat gravitasi atau titik-titik ancaman yang pada akhirnya mengurangi opsi ancaman menjadi nol. Setiap pengembangan situasi lebih lanjut dan pengurangan jumlah kemungkinan yang harus dipertimbangkan, sehingga meminimalisir ketidakpastian. Setiap ancaman bereaksi, ketidakpastiannya meningkat. Mengembangkan situasi dengan memaksa ancaman untuk bereaksi adalah esensi dari meraih inisiatif (Arto et al, 2019).

Konsistensi dalam melakukan inisiatif dapat mengakibatkan tekanan yang secara terus menerus pada ancaman. Pangkogasgab melakukannya dan menyinkronkan fungsi-fungsi Operasi dengan terus mengubah kombinasi keadaan pada tempo yang tidak

dapat dihitung secara efektif. Pangkogasgab dan staf menggunakan aset pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi upaya ancaman. Selama pelaksanaan, Pangkogasgab menciptakan serangkaian tindakan yang mulus dan tidak terputus yang memaksa ancaman untuk bereaksi segera dan tidak memberikan kesempatan. Idealnya, tindakan ini membuat ancaman yang dihadapi penuh dengan dilemma (Arief et al, 2021).

Mencapai tingkat inisiatif pada unsur perencanaan dan pelaksanaan Tanpa Tindakan itu tidak mungkin. Menghadapi situasi yang tidak pasti, ada kecenderungan alami untuk ragu dan mengumpulkan lebih banyak informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Meskipun menunggu dan mengumpulkan informasi dapat mengurangi ketidakpastian, tetap tidak dapat menghilangkannya. Menunggu bahkan dapat meningkatkan ketidakpastian. Para pemimpin yang efektif dapat mengelola ketidakpastian dengan bertindak dan mengembangkan situasi. Ketika situasi langsung tidak jelas, Pangkogasgab mengklarifikasi dengan tindakan, bukan dengan duduk dan mengumpulkan informasi. Peristiwa yang menawarkan cara-cara yang lebih baik untuk sukses adalah peluang, Pangkogasgab mengenali peluang dengan terus memantau dan mengevaluasi situasi, kegagalan untuk memahami peluang yang melekat pada ancaman dapat menyebabkan kerugian.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kogabwilhan I merupakan Kotamaops TNI yang bertugas sebagai penindak awal dan pemulih bila terjadi OMP, serta sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dan luar sesuai dengan kebijakan Panglima. Sebagai Kotamaops Mabes TNI. Konsep Kampanye militer yang dilakukan Kogabwilhan I dalam pelaksanaannya selaras sebagaimana Kerangka Strategis di mana negara menentukan tujuan keamanan nasional atau multinasional dan mengembangkan

sumber daya nasional, termasuk militer, untuk mencapainya, Kerangka operasional di mana kampanye dan operasi besar direncanakan, dilakukan dan dipertahankan.

Berdasarkan teori strategi dalam pelaksanaan operasi militer Kogabwilhan I mempertimbangkan tentang Ends, Ways, dan Means. Penyelarasan kekuatan untuk mencapai tujuan strategis dan/atau operasional melalui desain, organisasi, integrasi dan pelaksanaan strategi, kampanye.Keamanan, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, meliputi fungsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun, konteksnya juga ditentukan oleh hubungan masyarakat yang menopang dan terjalin dengan elemen-elemennya.

Kerjasama dimaknai sebagai bentuk proses sosial untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing, dalam mendukung pelaksanaan Kampanye Militer. Salah satunya adalah Pemprov Kepri menghibahkan tanah yang digunakan sebagai markas Kogabwilhan I dan di Kabupaten Dabo singkep Pemprov Kepri menghibahkan Area Pantai sebagai daerah pendaratan Amfibi, serta mendirikan jaringan 4G internet di Kepulauan Anambas dan Natuna.

Terselenggaranya kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dari aspek darat, laut dan udara dengan komponen masyarakat agar terbangun hubungan emosional yang erat dan positif antara prajurit dengan masyarakat, sehingga prajurit dapat mencintai dan dicintai rakyat serta terbangun kesadaran bela negara dalam masyarakat guna meningkatkan kemandirian TNI dengan program Binter bidang Pembinaan ketahanan wilayah salah satunya melalui metode Komunikasi sosial tersebut dilaksanakan kepada seluruh komponen masyarakat, aparat pemerintah, Keluarga Besar TNI untuk membangun suatu kondisi juang yang dinamis dan tangguh.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief, R., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). UNDERSTANDING NATIONAL IDENTITY TO CREATE LOVE AND PROUD OF BEING A PART OF THE INDONESIAN NATION. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2549–2556.
- [2] Arto, R. S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi pertahanan laut indonesia dalam perspektif maritim menghadapi globalisasi indonesia's deep marine defense strategy maritime's perspective facing globalization. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(2), 65–86.
- [3] Bambang Suranto. *Komunikasi Sosial TNI AD Guna Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Kepentingan Haneg*. Bandung: Seskoad, 2009.
- [4] Blackwill, Robert D, Jerome A Cohen, and Elizabeth C Economy. *Territorial Disputes in the South China Sea*. September 2, 2021. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea>.
- [5] BPK RI. *Peta Wilayah*. Januari 15, 2022. <https://kepri.bpk.go.id/peta-situs/>.
- [6] Buku Putih Pertahanan Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.
- [7] Council on Foreign Relations. *Military-confrontation-south-china-sea*. May 21, 2020. <https://www.cfr.org/report/military-confrontation-south-china-sea>.
- [8] Dipua, A., Prakoso, L. Y., & Nurdiansyah, D. R. D. R. (2021). ANALYSIS OF DEFENSE STRATEGY POLICIES IN DEALING WITH THE POTENTIAL NEGATIVE IMPACTS OF THE SOUTH CHINA SEA CONFLICT. *Jurnal Pertahanan*, 7(1), 89–99.

- <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal>
- [9] Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(1), 15–30. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.283>
- [10] Hasyim, L. O. M., Prakoso, L. Y., Risman, H., La Ode, M. H., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). Perang Semesta (Total War) Strategy for Preventing Terrorism Act (Study in Sultan Hasanuddin International Airport). *Sciences*, 4(2), 76–86. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.277>
- [11] Headquarters Department of the Army. "The Operations Process." *Army Doctrine Publication*, May 17, 2012: 5-6.
- [12] Hendri, H., Handoko, R., Darmawan, A., Prakoso, L. Y., Daengs, Gsa., & H Hendri1 R Handoko1, A Darmawan1, L Y Prakoso1, GS Achmad Daengs2 1: Universitas 17 Agustus 1945, Indonesia 2: Universitas 45 Surabaya, Indonesia, \*. (2019). The paradigm of Character Building Between Hope and Challenge. *The 1st Asian Conference on Humanities, Industry, and Technology for Society, ACHITS 2019, 1*(Character Building).
- [13] Hermawan, T., Prakoso, L. Y., Sianturi, D., Pertahanan, S., Fakultas, L., Pertahanan, S., & Pertahanan, U. (2021). INDONESIA ' S SEA DEFENSE STRATEGY IN IMPACT ANALYSIS AND THE GOVERNMENT ' S EFFORT TO SECURE. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(3), 273–296. <http://139.255.245.7/index.php/SPL/article/view/641/603>
- [14] Indah Novita Sari. "Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menghadapi Intenasionalisasi Isu Gerakan Separatis Papua Merdeka Tahun 2000-2013." *Tesis Universtas Pertahanan* (Universitas Pertahanan), 2015: [http://opac.lib.idu.ac.id/library\\_unhan/index.php?p=show\\_detail&id=6187](http://opac.lib.idu.ac.id/library_unhan/index.php?p=show_detail&id=6187).
- [15] Jeffrey W. Meiser. "Are Our Strategic Models Flawed ?" *Contemporary Strategy & Landpower Vol. 46 No. 4*, 17 Juni 2016: 80-81.
- [16] Junaidi, M. E., Prakoso, L. Y., Eka, M., & Yudho, L. (2021). Pancasila as the Basis for Indonesia's Universal Defense. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(2), 148–154. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.283>
- [17] Karl w Deutsch. *Nationalism and Social Communication*. Cambridge, Massachusetts, and London, England: THE M.I.T Press, 1966.
- [18] Kasih Prihantoro Zakariya, Lukman Yudho Prakoso, Ratna Damayanti, A. D. (2019). Public Policy Analysis of Defense Areas and Defense Area Plan In Grati Pasuruan. *The 3th Indonesia International Defense Science Seminar*, 2(Universitas Pertahanan), 483–490.
- [19] Kemhan. *Sistem Pertahanan dan Keamanan Sishankamrata Abad-21*. Jakarta: Biro Humas Kemhan RI, 2021.
- [20] Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., Sianturi, D., Pertahanan, S., Fakultas, L., Pertahanan, S., & Pertahanan, U. (2021). Relevansi Strategi Pertahanan Laut Berdasarkan Doktrin Jalesveva Jayamahe Terhadap Globalisasi Dan Perkembangan Lingkungan Strategis. *Strategi Pertahanan Laut*, 6(1), 77–100.
- [21] La Ode, M. H., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). PERANG SEMESTA MELALUI OPTIMALISASI PENERAPAN NILAI PANCASILA PERSATUAN INDONESIA DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA. *Strategi Perang Semesta*, 7(1).

- [22] Lebo, D., Midhio, I. W., & Prakoso, L. Y. (2021). Comparison of The Indonesia Guerrilla War In The Perspective of The Universal War. *Journal Of Sosiasl Science*, 2. <https://doi.org/https://jsss.co.id/index.php/jsss/article/view/122>
- [23] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68. "Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara." Tahun 2014.
- [24] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8. "Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024." Tahun 2021.
- [25] Pramono, B., & Prakoso, L. Y. (2021). Political Policy for the Papuan Issue in the Context of National Defense. *ITALENISCH*, 11(2), 271–275. <http://italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/118>
- [26] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- [27] Suhirwan Adryan Ole, Cecep Kurniawan, L. Y. P. (2020). Indonesian Navy Against Covid-19. *Public Policy And Administration Research*, 10(IISTE), 18–23.
- [28] Tentara Nasional Indonesia 7 Oktober . "Konsep Umum Operasional." 2019.
- [29] TNI. *Naskah Departemen*. Bandung: Sesko TNI, 2019.
- [30] Undang-Undang RI Nomor 17. "Tentang Inteljen Negara." 2011.